

LATAR BELAKANG LAHIRNYA MANIFES KEBUDAYAAN

2.1 Kondisi Kesusastaan dan Perpolitikan di Indonesia Pra-Manifes Kebudayaan

Kondisi kesusastaan dan perpolitikan di Indonesia sebelum peristiwa lahirnya Manifes Kebudayaan menarik untuk dilihat agar diketahui latar peristiwa yang terjadi pada masa itu dan akhirnya dapat dilihat latar belakang lahirnya Manifes Kebudayaan. Pada tahun 1957, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada masa periode demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno.

Pada masa itu, kata "revolusi" begitu keras gaungnya di Indonesia. Soekarno sebagai Presiden RI dan Panglima Tertinggi RI mendasarkan segala tindakannya atas pendapat bahwa revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur belum selesai. Menurutnya, revolusi masih akan berjalan terus sebelum tercapai Indonesia yang adil dan makmur.¹ Pidato Presiden Soekarno berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" bahkan dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960.² Pidato tersebut akhirnya dikenal sebagai Manipol yang merupakan singkatan dari Manifesto Politik.

Manifesto Politik berisi tentang pernyataan Soekarno yang mengungkapkan bahwa revolusi belum selesai. Oleh karena itu, ia menyerukan untuk dibangkitkannya kembali semangat revolusi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa revolusi tersebut harus dilakukan di segala bidang.

Sejak pidato tersebut dikumandangkan dan kemudian dijadikan sebagai GBHN, setiap kegiatan maupun organisasi masyarakat diharuskan berdasarkan pada Manipol. Manipol ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan di segala tingkat pendidikan dan pemerintahan. Media massa juga diharuskan mendukung kegiatan penyebarluasan tersebut. Bahkan Ricklefs mengungkapkan bahwa surat

¹ Herberth Feith dan Lance Castle (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945—1965* (Jakarta, 1995), hlm. 125.

² Marwati Juned Puspongoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta, 1993), hlm. 313.

kar yang menolak melakukan penyebaran gagasan Manipol dilarang terbit, seperti surat kabar yang pro-Masyumi dan pro-PSI.³

Gagasan Soekarno tentang Manifesto Politik ini tampaknya digunakan PKI sebagai sebuah kesempatan untuk memperoleh kekuasaan di Indonesia. PKI mencoba berusaha mendukung ajaran-ajaran Presiden Soekarno untuk menarik dukungan darinya. PKI mendukung penuh ajaran Soekarno tentang Manipol-USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Bahkan ketua PKI, D.N. Aidit mengatakan, "Melaksanakan Manipol secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum Manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan mensabot Manipol".⁴

Usaha PKI untuk mengambil simpati Soekarno berhasil. Kekuasaannya pada masa itu cukup besar dalam mendominasi kehidupan politik dan kebudayaan di Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan kedekatan partai tersebut dengan Presiden Soekarno.

PKI merupakan sebuah organisasi politik yang pada masa itu merupakan salah satu partai yang mempunyai kedudukan penting di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 1955 yang menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan Partai Nadhatul Ulama. Dalam pemilihan umum tersebut, PKI mendapat 6.176.914 suara.⁵

Anggota PKI pun dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ricklefs mengatakan bahwa jumlah anggota PKI pada akhir 1962 mencapai lebih dari dua juta orang.⁶ Angka ini tentunya cukup besar dan akhirnya menempatkan PKI menjadi partai komunis terbesar di negara nonkomunis di dunia.

Selain mempunyai jumlah anggota dan pendukung yang begitu besar, PKI ternyata juga mempunyai 100.000 orang yang tergabung sebagai front intelektual tual PKI. Pada bulan Maret 1962, kedudukan PKI pun semakin kuat dengan diangkatnya D.N. Aidit dan Njoto sebagai menteri-menteri penasihat oleh

³ M. C. Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia 1200—2004* (Jakarta, 2005), hlm. 527.

⁴ *Ibid*, hlm. 317.

⁵ Marwati Juned Pusponogoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta, 1993), hlm. 230.

⁶ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200—2004* (Jakarta, 2005), hlm. 534.

Soekarno.⁷ Tentu saja hal ini memberikan kekuasaan yang cukup besar dan ruang gerak yang lebih luas bagi PKI di Indonesia.

Sebagai sebuah partai besar di Indonesia, PKI sepertinya menyadari bahwa kesenian dan kesusastraan merupakan bagian penting yang dapat menguatkan kekuasaan politiknya. PKI tampaknya terilhami oleh ideologi kaum Marxis-Komunis. Kaum Marxis-Komunis memandang seni dan sastra sebagai bagian dari kehidupan partai politik yang penting sehingga kegiatan seni dan sastra harus dikendalikan dan diawasi secara ketat. Seni dan sastra bagi kaum Marxis-Komunis dianggap sebagai sebuah sekrap yang menjadi bagian dari pekerjaan partai yang besar. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya Lenin menggariskan bahwa koran-koran harus menjadi alat partai. Sementara itu, para pengarang harus menjadi anggota partai. Tidak hanya itu saja, Lenin juga mengungkapkan bahwa pusat-pusat penerbitan dan penyebaran tulisan, toko-toko buku dan ruang-ruang bacaan, dan juga seluruh karya harus diawasi secara ketat oleh partai.⁸

Oleh karena itu, pada 17 Agustus 1950, PKI mendirikan sebuah organisasi kebudayaan untuk memperkuat kedudukan politik partainya di Indonesia. Organisasi kebudayaan tersebut dinamakan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau disingkat dengan Lekra. Lekra didirikan atas inisiatif D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto.

Pada awalnya, anggota Lekra sedikit. Anggota-anggota pertama Lekra merangkap sebagai pengurus Lekra juga. Mereka adalah A.S. Dharta, M.S. ashar, Herman Arjuno, Henk Ngantung, Njoto, dan Joebar Ajoeb. Kemudian, Lekra mulai menarik para sastrawan dan seniman untuk masuk menjadi anggota Lekra. Cara Lekra menarik perhatian kaum sastrawan adalah dengan pendekatan ekonomis dan psikologis.

Pendekatan ekonomis dilakukan dengan memberikan bantuan keuangan terhadap para sastrawan yang pada masa itu tidak bisa membiayai hidupnya jika hanya dari hasil karya sastranya. Selain itu, perhatian masyarakat terhadap kehidupan kaum seniman dan sastrawan juga sangat kurang. Oleh karena itu,

⁷ *Ibid*, hlm. 534.

⁸ Nurdien H. Kristanto, "Kekuasaan Politik, Ideologi, dan Sastra", *Konstelasi Sastra: Bunga Rampai Esai Sastra* (Jakarta, 1990), hlm. 187.

Lekra mengambil pendekatan ekonomi terhadap sastrawan untuk masuk ke dalam Lekra. Sementara itu, pendekatan psikologis dilakukan dengan memberikan jabatan-jabatan penting para sastrawan. Cara Lekra tersebut ternyata membuahkan hasil. Beberapa pengarang masuk ke dalam Lekra. Para pengarang tersebut di antaranya yaitu S. Anantaguna, Sobron Aidit, Pramoedya Ananta Toer, S. Rukiah, dan Utuy Tatang Sontani.

Salah satu bukti konkret bahwa Lekra melakukan pendekatan secara ekonomis terhadap sastrawan yaitu dari pengakuan Lukman Ali. Ia dalam artikel yang berjudul "Prahara Budaya, 31 Tahun Lalu" mengungkapkan Utuy Tantang Sontani pernah mengatakan kepadanya bahwa Njoto pernah datang kepadanya dan menawarkan bantuan untuk sekolah anak-anaknya serta bantuan kesehatan untuk keluarga dengan berobat kepada dr. Tanti Aidit yang merupakan istri D. N. Aidit.⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa Lekra tampaknya mengerti salah satu masalah yang dihadapi sastrawan pada masa itu, yaitu masalah ekonomi. Oleh karena itu, Lekra menggunakan pendekatan ekonomis untuk menarik sastrawan bergabung dalam Lekra. Tampaknya, cara ini dapat dikatakan berhasil dengan melihat cukup banyaknya sastrawan yang menjadi penulis-penulis Lekra.

Sebagai sebuah organisasi kebudayaan, Lekra mempunyai beberapa konsep. Salah satu konsep Lekra yaitu konsep "seni untuk rakyat". Konsep "seni untuk rakyat" yang dimaksud oleh Lekra adalah bahwa seni diciptakan untuk rakyat. Karya seni yang baik adalah seni yang berpihak pada rakyat. Konsep "seni untuk rakyat" tersebut membuat Lekra mengharuskan para sastrawan membuat karya sastra yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat.

Dalam Mukadimmah Lekra, organisasi kebudayaan tersebut menyatakan bahwa Lekra didirikan berlandaskan rakyat. Lekra mengungkapkan bahwa rakyat merupakan satu-satunya pencipta kebudayaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya seni atau sastra mengabdikan pada rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Menyadari, bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat, disingkat Lekra. Pendirian ini terjadi di

⁹ Lukman Ali, "Prahara Budaya, 31 Tahun Lalu," *Media Indonesia*, 25 Juni, 1995.

tengah-tengah proses perkembangan kebudayaan yang sebagai hasil keseluruhan daya-upaya manusia secara sadar untuk memenuhi, setinggi-tingginya kebutuhan lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya.¹⁰

Penulis-penulis Lekra memang banyak yang menulis sajak dan cerpen yang ”berpihak pada rakyat”. Rakyat yang diperjuangkan oleh Lekra yaitu buruh dan tani. Salah satu sastrawan Lekra yang mengangkat petani dalam puisinya yaitu Agam Wispi dengan puisinya yang berjudul ”Latini” yang terdapat dalam kumpulan *Matinya Seorang Petani*. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Latini, ah, Latini
gugur sebagai ibu
anak kecil dalam gendongan
gugur diberondong peluru
Latini, ah, Latini
gugur diberondong peluru
bayi mungil dalam kandungan
tanah dirampas suami dipenjara
tengkulak mana akan beruntung?
desa ditumpas
traktor meremuk palawija
pembesar mana akan berkabung?¹¹

Agam Wispi melalui puisi di atas mengungkapkan bahwa ia berpihak kepada rakyat yang tertindas. Rakyat yang tertindas yang dimaksud dalam puisi di atas adalah petani. Mereka digambarkan mengalami penderitaan. Lahan pertanian dihancurkan oleh traktor. Para pembesar pun tidak ada yang peduli dengan nasib mereka. Melalui puisi tersebut, Agam Wispi tampaknya ingin mengkritik para pembesar yang tidak peduli terhadap penderitaan rakyat kecil. Jelaslah bahwa dalam karyanya di atas, karya Agam Wispi berpihak kepada rakyat

Selain melalui puisi, penulis-penulis Lekra juga menerapkan semboyan ”seni untuk rakyat” ke dalam cerpen. Salah satu cerpen yang mengangkat permasalahan rakyat adalah ”Perayaan dan Pemogokkan” karya Sobron Aidit. Cerpen ini bertemakan perjuangan buruh. Cerpen ”Perayaan dan Pemogokkan” bercerita tentang buruh-buruh perusahaan Belanda yang ingin mengadakan

¹⁰ Lekra, ”Laporan Kebudayaan Rakyat” (Jakarta, 1959), hlm. 22.

¹¹ *Ibid.*

perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun kegiatan ini ditolak oleh pimpinan perusahaan yang merupakan orang Belanda. Walaupun tidak disetujui, mereka tetap mengadakan perayaan tersebut. Mereka menyiapkan panggung dan pertunjukkan rakyat yang akan dipentaskan di perayaan tersebut. Keesokan harinya, ketika hari perayaan itu tiba, panggung dan segala perlengkapan peralatan dibakar oleh pihak perusahaan. Buruh-buruh tersebut pun tidak lantas menyerah. Mereka kemudian mengadakan perayaan tersebut di pinggir pantai. Acar tersebut akhirnya sukses. Buruh-buruh pun tampak bahagia

Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pimpinan perusahaan itu memecat beberapa buruh karena melakukan pembangkangan. Buruh-buruh pun kemudian berdemo dan juga menuntut kenaikan gaji. Akhirnya, dengan perjuangan buruh yang gigih, permintaan buruh-buruh tersebut dikabuli.

Suasana kota penuh semangat. Buruh2 mendjadi pahlawan dimata Rakjat. Rakjat dan buruh lalu seikatan dan persamaan nasibnja lebih terasa semendjak pemogokkan ini. Buruh2 adalah anak Rakjat. Rakjat dan buruh lalu mendjadi satu kekuatan utama.¹²

Dari cerpen di atas dapat dilihat bahwa Sobron Aidit membela rakyat, yang dalam hal ini adalah buruh. Dalam cerpennya tersebut, ia mengungkapkan bahwa buruh merupakan pahlawan rakyat dan pihak buruhlah yang akan menang. Sobron Aidit dalam membuat cerpen ini tampaknya hanya mementingkan isi daripada estetikanya. Jalan ceritanya mudah ditebak dan bahasa yang dipakai kurang estetik. Cerpen ini terasa hanya sebagai alat propaganda saja.

Hal di atas menunjukkan penulis Lekra tampaknya lebih mementingkan isi dari suatu karya daripada nilai estetikanya. Jika karya tersebut berpihak kepada rakyat, khususnya buruh dan tani, karya tersebut dianggap bernilai tinggi. Hal ini tampaknya bertentangan dengan isi mukaddimah Lekra yang menyatakan bahwa Lekra menolak pemerkosaan terhadap nilai kebenaran dan keindahan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

”Singkatnya, dengan menolak sifat anti-kemanusiaan dan anti-sosial dari kebudayaan bukan rakyat, dengan menolak perkosaan terhadap kebenaran dan terhadap nilai-nilai keindahan—Lekra bekerja untuk

¹² Sobron Aidit, *Derap Revolusi*, (Jakarta, 1962), hlm. 165.

membantu pembentukan manusia baru yang memiliki segala kemampuan untuk memajukan dirinya dalam perkembangan kepribadian yang bersegi banyak dan harmonis.¹³

Selain konsep "seni untuk rakyat", Lekra juga menganut semboyan "politik adalah panglima". Bagi Lekra, semboyan "politik adalah panglima" mempunyai pengertian bahwa kepentingan partai di atas segalanya, termasuk juga sastra. Sastra Lekra harus tunduk kepada kepentingan partai, yaitu PKI. Kegiatan sastra para sastrawan Lekra harus mengikuti ketentuan PKI. Penilaian karya sastra dilihat dari bobot politik komunisme yang terdapat di dalamnya. Sebuah karya sastra dinilai baik apabila karya tersebut membantu kepentingan PKI, dan sebaliknya, jika tidak membantu dan tidak sejalan dengan ideologi PKI, karya tersebut akan dinilai buruk.

Menurut pandangan Lekra, sastra memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Bahkan lebih keras lagi, Lekra menganggap bahwa sastra memang harus berpolitik. Sastra yang berpolitik dianggapnya akan menghasilkan karya yang jujur. Hal ini dilihat dari kutipan berikut

"Sebagai kelanjutannya kita harus mutlak berpendapat bahwa sastra tidak bisa dipisahkan dari politik. Bahkan sastra itu harus berpolitik dalam arti politik revolusi. Apabila sastra yang berpolitik itu telah dapat mengintegrasikan diri dengan revolusi secara mutlak maka sastra tersebut telah diciptakan dengan jujur. Dan hanya dalam pengertian inilah 'mencipta dengan jujur' dapat dipakai".¹⁴

Dalam kumpulan sajak Agam Wispi yang berjudul *Yang Tak Terbungkam*, setidaknya ada dua puisi yang khusus dibuat untuk partai. Sajak tersebut yaitu "Jakarta Oi Jakarta" (1958) dan "Plakat" (1960).

Pada sajak "Jakarta Oi Jakarta", Agam Wispi memberi keterangan di bawah judul sajak dengan tulisan "bagi partai, diri kita yang tak mau diam bagai lautan."¹⁵ Sementara itu, sajak "Plakat" ditulis sajak Agam Wispi sebagai hadiah untuk ulang tahun partai. Di bawah sajak tersebut juga diberi keterangan "buat

¹³ Lekra, "Laporan Kebudayaan Rakyat" (Jakarta, 1959), hlm. 22.

¹⁴ "Dipakai untuk Merongrong," *Bintang Timur*, 24 Mei, 1964.

¹⁵ Agam Wispi, *Yang Tak Terbungkamkan*, (Jakarta, 1960), hlm. 36.

ulang tahun partai".¹⁶ Sajak ini mengungkapkan bahwa partai menjadi penolong rakyat yang memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Berikut merupakan sepenggalan sajak "Plakat" yang menggambarkan bahwa partai menjadi penolong rakyat yang dapat membebaskan manusia

....
 dialah jang membuka pintu abad baru
 partai, dimana penjair mendjadi rindu

 seorang egom mati ditiang-gantungan belanda
 baginja partai hilang satu datang berdjuta

 partai, diri kita jang gemuru bagai gelombang
 dan takkan pernah diam

 partai, tanah hitam panen petani
 dan buruh mengetjap nikmat hari

 partai, dimana rakjat menemukan dirinja
 untuk pembebasan kerdja, pembebasan manusia¹⁷

Dari sajak di atas dapat dilihat bahwa Agam Wispi memuji-muji partainya, yaitu PKI. PKI digambarkannya sebagai sebuah partai penyelamat. PKI membawa sebuah kehidupan baru. Agam Wispi mengungkapkan bahwa PKI sebagai partai yang membela buruh dan petani membawa sebuah kebebasan bagi rakyat. Dari puisi di atas dapat terlihat bagaimana puisi dijadikan sebagai alat propaganda untuk kepentingan partainya.

Selain Agam Wispi, H. R. Bandaharo juga menciptakan sajak yang menggambarkan tentang PKI, yaitu sajak "Sepertjik Api Yang Membakar". Sajak tersebut diberi subjudul "untuk kongres VII PKI".

— bagaimana keadaan, kawan²?
 ah, alangkah indah semua ini.
 diairdjaman, disimpangempat, disungai djawi²
 kaum tani mengembangkan barisan.
 dinatalu? penebang² kaju mulai membatja buku.
 sungai lebah, sungai kepajang, sungai angka
 penggarap tanah, pembakar kapur, pemandjat kelapa
 bahu-membahu, salingbantu dan berlawan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74.

untuk pelaksanaan bagihasil, kenaikan upah, perbaikan kerdja.

— bagaimana dikota?

beramal kepada rakjat dan gerakan 1001
memobilisasi tenaga bedil dan tenaga pangan.

— kawan2, kita berdjjuang dan berjanji.

ah, alangkah menawan jang muda² ini.

mereka tak kenal lelah tak kenal djemu
seniman2 persiapkan drama, njanji dan tari
untuk menjambut kongres, 1 dan 23 mei.

— dan kaum nelajan?

mereka mengikuti djedjak sidjantan
berdjjuang untuk hak dan kebebasan.

alangkah indah dan segar.

ai, bermimpikah aku?

benih disemai telah mendjadi

setjulim kasih telah menebar.

jang tumbuh dan menebar ini

sepertjik api

jang membakar.

itulah partai

dan partai telah hadir disini

dibanjak hati.¹⁸

H. R. Bandaharo tampaknya sengaja membuat puisi yang berjudul "Seperti Api Yang Membakar" sebagai suatu bentuk ekspresinya dalam menggambarkan partainya. Dari kutipan puisi di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa ia begitu memuji-muji partainya, yaitu PKI. PKI digambarkan membawa sebagai sebuah partai yang membawa kebahagiaan. PKI membawa kehidupan yang lebih indah. Dalam puisi tersebut digambarkan bahwa PKI membuat petani dan buruh hidup bahagia.

Dari kedua contoh puisi di atas yang dibuat oleh penulis Lekra memperlihatkan bahwa sastrawan Lekra membuat beberapa karya sebagai bentuk pengabdian terhadap partainya. Hal ini memperlihatkan bahwa sastrawan Lekra harus segaris dengan keinginan partai, yaitu PKI.

Organisasi Lekra terus mengalami perkembangan. Sejak tahun 1959, kedudukan Lekra cukup kuat dalam percaturan budaya Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kedudukan PKI yang juga semakin kuat dalam percaturan politik Indonesia. Terlebih organisasi ini juga mendapat dukungan hebat dari Presiden

¹⁸ Hr. Bandaharo, *Dari Bumi Merah*, (Jakarta, 1963), hlm. 66.

Soekarno. Posisinya yang cukup menguntungkan ini membuat Lekra menjatuhkan lawan-lawan yang ideologinya berseberangan dengan mereka. Mereka melancarkan serangan-serangan kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan keberadaannya.

Salah satu tokoh yang mendapat serangan dari Lekra adalah H.B. Jassin, kritikus besar Indonesia. Sejak awal tahun 1950-an, H.B. Jassin telah dikecam oleh pengarang-pengarang Lekra karena ia menganut humanisme universal. Ia mengungkapkan bahwa humanisme universal merupakan sebuah paham yang mencari nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku bagi segala manusia.¹⁹ Konsep humanisme universal ini tidak sesuai dengan ideologi Lekra. Seorang sastrawan, Buyung Saleh, merupakan salah satu sastrawan Lekra yang mengecam humanisme universal. Hal ini dapat dilihat dari tulisannya yang dimuat dalam *Indonesia*

”Kaum borjuis mencoba mengemukakan anjuran pemisahan kaum seniman dari masyarakat dengan menganjurkan ”seni tak berpihak”, ”seni tanpa kelas”, ”seni universal dan kosmopolitan”, yang berjudul formalisme. Dengan semboyan ”seni untuk seni”, borjuis hendak memencilkan dan mengucilkan kaum seniman dari rakyat banyak.”²⁰

Serangan lain yang dilancarkan kepada H.B. Jassin adalah dengan membujuk dan mengancam para sastrawan untuk menolak hadiah *Sastra* yang dipimpin oleh H. B. Jassin. Pengarang yang menolak hadiah *Sastra* tersebut yaitu Motinggo Busye, Virga Belan, dan M. Poppy Hutagalung. Cerpen Motinggo Busye yang berjudul ”Nasihat untuk Anakku” menjadi juara kedua. Cerpen ”Pangeran Jakarta” karya Virga Belan menjadi juara ketiga. Sementara itu, sajak Poppy Hutagalung ”Pada suatu Bulan yang Cerah” dan ”Kereta Tua” mendapat juara ketiga kategori puisi.²¹

Lekra menjuluki seniman dan sastrawan yang berbeda ideologinya dengan Lekra sebagai sastrawan kontrarevolusioner. Menurut Lekra, sastra harus bersifat

¹⁹ H. B. Jassin, ”Sastra Masuk Tahun Keempat (Tahun Konfrontasi),” *Sastra*, 1964, hlm. 4.

²⁰ Buyung Saleh, ”Ke Arah Seni Berisi, Sekitar Soal Tendens,” dalam *Indonesia*, Juni /Juli, 1953, hlm. 337.

²¹ D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (ed), *Prahara Budaya* (Jakarta, 1995), hlm. 42.

revolusioner. Sastra revolusioner alam konsep Lekra yaitu sastra yang mengabdikan kepada revolusi. Jika suatu karya sastra dinilai tidak mengabdikan kepada kepentingan revolusi, maka dianggap kontrarevolusioner. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

”Sastra revolusioner adalah sastra yang secara sadar dicitakan untuk mengabdikan revolusi. Ini berarti integrasi ke dalam revolusi dan sekali2 tak mungkin meninjaunya secara terpisah-pisah. Kalaupun sampai terlihat adanya ’alternatif’, maka yang terlihat antara sastra dan revolusi, melainkan antara sastra revolusioner dan sastra kontra revolusioner!”²²

Adanya tekanan Lekra terhadap para sastrawan Indonesia yang harus membuat karya sastra yang revolusioner membuat tema revolusioner menjadi tema sentral pada masa itu. Selain menyebarkan konsep-konsep mereka, Lekra juga membatasi ruang gerak surat kabar dan majalah di Indonesia. Surat kabar dan majalah yang dianggap Lekra tidak sesuai dengan konsep mereka harus menyingkir dan tersingkir. Selain itu, Lekra juga menguasai bidang penerbitan. Persyaratan untuk mendapatkan Surat Ijin Terbit dan Surat Ijin Cetak diperketat. Sejak 1960, semua penerbit surat kabar dan majalah diwajibkan mengajukan permohonan Surat Izin Terbit (SIT). Salah satu persyaratan surat kabar atau majalah untuk dapat diberi Surat Izin Terbit adalah harus mendukung Manipol USDEK. Hal ini tentunya membuat makin sedikitnya media masa yang masih terbit pada masa itu seperti *Harian Rakyat*, *Bintang Timur*, dan *Warta Bhakti*.²³

Melalui *Harian Rakyat* surat kabar resminya, Lekra menyebarkan kampanye agitasi dan propaganda untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Di samping *Harian Rakyat*, Lekra menerbitkan berkala lainnya seperti *Bintang Muda*, *Mingguan Sport*, *Harian Rakyat Minggu*, dan *Zaman Baru*.

Keberadaan wartawan pun tidak luput dari pengawasan ketat Lekra. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan satu-satunya organisasi profesi wartawan yang ada dan diakui pemerintah diawasi oleh Lekra. PWI tersebut akhirnya didominasi oleh wartawan-wartawan yang mendukung PKI.

²² Adnan Basalamah, “Tentang Sastra Revolusioner,” *Bintang Timur*, 24 Mei, 1964.

²³ H. Soebagio I.N., *Sejarah Pers Indonesia* (Jakarta, 1977), hlm. 120—125.

Bahkan, Departemen Penerangan akhirnya juga bersikap mendukung garis yang diajukan PKI.²⁴

Kehidupan kebudayaan yang begitu luas dikuasai Lekra sejak tahun 1959, tentunya memberikan tekanan berat terhadap kaum seniman dan sastrawan di luar Lekra. Kebebasan mencipta dan kreativitas sastra menjadi terganggu. Kehidupan penciptaan seolah-olah harus setia kepada PKI. Oleh karena itu, para sastrawan di luar Lekra akhirnya mencoba membentuk organisasi-organisasi kebudayaan yang berlandung pada partai politik tertentu untuk dapat bertahan.

Pada masa itu, lembaga kesenian dan kebudayaan partai tumbuh subur seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN/PNI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra/PKI), Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi/NU), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI/Masyumi), Lembaga Kebudayaan Indonesia Katholik (LKIK/Partai Katholik), Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia (Lakmi/PSII), dan Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi/Perti).²⁵ Beberapa seniman dan sastrawan yang tidak mau berdiri di bawah naungan partai menciptakan suatu kelompok tersendiri.

Di bawah tekanan PKI dan Lekra itulah muncul sejumlah seniman dan sastrawan yang menyatakan sikapnya. Mereka yang tidak mau menyangkutpautkan hasil karyanya dengan kepentingan politik berkumpul dan membuat pernyataan budaya yang dikenal dengan nama Manifes Kebudayaan. Pada tanggal 17 Agustus 1963, sekelompok cendekiawan yang menentang Lekra memproklamasikan Manifes Kebudayaan yang walaupun mendukung Pancasila, tidak mau mendukung Manipol-USDEK atau Nasakom dan menghendaki suatu kebudayaan yang tidak didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu.

1.2 Lahirnya Manifes Kebudayaan

Ada beberapa pendapat mengenai latar belakang lahirnya Manifes Kebudayaan. Menurut Wiratmo Soekito yang merupakan konseptor naskah

²⁴ Marwati Juned Pusponogoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta, 1993), hlm. 380.

²⁵ Choitrotun Chisaan, *Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta, 2008), hlm. 3.

Manifes Kebudayaan, Manifes lahir untuk mendeklarasikan ketidaksetujuannya terhadap realisme sosialis yang dianut oleh Lekra.²⁶ Para manifestan menganggap bahwa tujuan menghalalkan segala cara akan menghasilkan karya yang bukan seni melainkan politik yang totaliter.²⁷ Wiratmo Soekito juga mengatakan bahwa paling tidak ada tiga pendapat dari manifestan mengenai latar belakang lahirnya Manifes. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

”Dengan latar belakang inilah dalam tahun 1963, bersama-sama dengan H. B. Jassin dan kawan-kawan, saya mengumumkan sebuah Manifes yang menegaskan perbedaannya dengan realisme sosialisme yang dianut oleh Lekra. Perbedaan tersebut ialah, bahwa, bagi para Manifestan, di mana tujuan tidak menghalalkan cara maka hasilnya bukan seni, melainkan politik dalam arti kata yang insaniah dan demokratis. Manifes memberikan penilaian bahwa konsep seni yang diajarkan realisme sosialis hanya mementingkan tujuan karena kegiatannya bukan kegiatan kreatif. Akan tetapi, mengenai Manifes itu sendiri paling sedikit terdapat tiga aliran:

1. H. B. Jassin memandang lahirnya Manifes sebagai dukungan kepadanya dalam polemik majalah ”Sastra” yang dipimpinnya melawan teror-teror Lekra yang dipelopori Pramoedya Ananta Toer.
2. Bokor Hutasuhut (disponsori Alm. Kolonel Nur Nasution, pengawas kantor berita *Antara* kemudian) memandang lahirnya Manifes sebagai golongan karya di bidang kebudayaan; dan,
3. Saya sendiri memandang lahirnya Manifes sebagai pernyataan pada tingkat nasional yang tidak mengakui sahnya ”wakil-wakil” Indonesia dalam Konperensi Pengarang Asia-Afrika maupun Konperensi pengarang Asia Afrika itu sendiri sebagai forum kesusastraan.²⁸

Menurut H. B. Jassin, Manifes Kebudayaan dicetuskan sebagai reaksi atas fitnahan-fitnahan Lekra terhadap seniman dan sastrawan yang tidak setuju dengan ideologi Lekra. Seniman dan sastrawan tersebut dianggap Lekra sebagai reaksioner dan antirevolusioner. Oleh karena itu, Manifes Kebudayaan dicetuskan sebagai

²⁶ Kongres Persatuan Pengarang Rusia I (1934) mendefinisikan realisme sosialis sebagai metode dasar sastra dan kritik sastra Rusia yang menuntut agar para pengarang memberikan penyajian yang setia, penuh kebenaran, dan konkret berdasarkan sejarah, tentang realitas dalam perkembangannya yang revolusioner. Realisme social harus menggabungkan kesetiaan yang penuh kebenaran dan sifat konkret berdasarkan sejarah dalam penyajian artistik itu dengan tugas memberikan pendidikan ideology dan latihan buat para buruh dalam semangat sosialisme.

²⁷ Redaksi Berita Buana, ”24 Tahun Silam: Kesan dan Kenangan,” *Berita Buana*, 11 Agustus, 1987, hlm. 4.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

sebuah pernyataan seniman dan sastrawan yang di dalamnya terdapat cita-cita kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Namun akan menjawab serangan-serangan dan fitnahan-fitnahan yang dilemparkan orang terhadap *Sastra* dan pengarang-pengarang yang tergolong di dalamnya, atas inisiatif kawan-kawan pengarang, seniman dan cendekiawan disusun suatu manifes yang terkenal dengan "Manifes Kebudayaan" pada hari yang keramat 17 Agustus 1963. Di dalamnya dirumuskan apa yang menjadi cita-cita kebudayaan (inklusif kesusastraan) seniman dan cendekiawan kreatif dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran pada pembangunan mental negara dan pribadi bangsa.²⁹

Lahirnya Manifes Kebudayaan mempunyai sejarah panjang yang juga tidak bisa dilepaskan dari situasi politik. Pada masa itu, pihak angkatan darat ingin menciptakan sebuah organisasi untuk menandingi organisasi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). SOBSI merupakan organisasi buruh yang berdiri pada 29 November 1946 yang hubungannya begitu dekat dengan PKI. SOBSI digunakan PKI untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia. Oleh karena itu, angkatan darat juga membentuk Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) pada tahun 1961 sebagai usaha menandingi kekuatan SOBSI dan membendung kekuatan PKI.

Pada pertengahan tahun 1963, terdengar kabar bahwa SOKSI berencana untuk membentuk sebuah organisasi kebudayaan dalam lingkungan SOKSI. SOKSI menghubungi sastrawan Iwan Simatupang untuk dapat merealisasikan rencana tersebut. Menanggapi hal tersebut, Iwan Simatupang kemudian memberitahukan dan meminta pendapat kepada sastrawan dan seniman tentang hal tersebut. Ternyata para seniman dan sastrawan menanggapi hal tersebut dengan antusias. Namun, ternyata dalam prosesnya tidak lancar. Akhirnya, Iwan Simatupang menyerahkan kembali mandatnya kepada SOKSI.

Informasi tersebut diberitahukan kepada sastrawan dan seniman yang tergabung dalam majalah bulanan *Sastra* yang pada saat itu sedang mendapat kecaman dari Lekra. Melihat hal tersebut, para seniman dan sastrawan yang tergabung dalam majalah *Sastra* pun akhirnya berinisiatif untuk membuat suatu pernyataan budaya sebagai reaksi atas kehidupan kesenian dan kesusastraan pada

²⁹ H. B. Jassin, "Masuk Tahun Keempat (Tahun Konfrontasi)," *Sastra*, 1964, hlm. 4.

masa itu yang dikuasai Lekra. Wiratmo Soekito kemudian diminta untuk mengambilalih rencana Iwan Simatupang yang kandas tersebut. Ia menyetujuinya dengan syarat bahwa terlebih dahulu ia membuat konsepsinya. Kemudian naskah Manifes Kebudayaan selesai dikerjakan oleh Wiratmo Soekito tanggal 17 Agustus 1963 pukul 04.00. Setelah itu, ia memberikan naskah tersebut kepada Goenawan Mohamad dan Bokor Hutasuhut untuk dibicarakan dengan seniman dan sastrawan lain. Naskah Manifes Kebudayaan kemudian diperbanyak dan kemudian disampaikan kepada tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia untuk dipelajari.

Pada 23 Agustus 1963, pukul 11.00 WIB di Jalan Raden Saleh 19 diadakan pertemuan untuk membahas naskah Manifes Kebudayaan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 13 seniman Indonesia. Para seniman dan sastrawan tersebut yaitu Trisno Sumardjo, Zaini, H.B. Jassin, Wiratmo Soekito, Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Ras Siregar, Djufri Tanissan, Soe Hok Djin, Sjahwil, dan D.S. Moeljanto.³⁰

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad kemudian memberikan kesempatan kepada Wiratmo Soekito sebagai konseptor naskah Manifes Kebudayaan untuk menyampaikan penjelasan. Setelah Wiratmo Soekito memberikan penjelasannya, terjadilah diskusi di antara sastrawan dan seniman yang hadir pada pertemuan tersebut. Masalah yang cukup penting yang diperdebatkan adalah masalah humanisme universal. Wiratmo Soekito kemudian menjelaskan tentang humanisme universal sebagai berikut

“Humanisme universal yang dimaksud adalah kebudayaan sebagai pernyataan hidup manusia mempunyai tendensi-tendensi universal, yaitu universal dalam arti bahwa kebudayaan itu bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan di samping itu bukan hanya untuk satu angkatan saja, tetapi untuk semua angkatan. Meskipun demikian harus ditegaskan bahwa kebudayaan itu mempunyai titik tolak dan titik tolak itu adalah titik tolak nasional. Saya menyetujui sepenuhnya ucapan Dag Hammarskjöld bekas sekretaris Jenderal PBB yang meninggal dunia dalam tahun 1961 yang menyatakan bahwa harus menekankan niveu-nya ke arah kepentingan internasional. Dan inilah pengertian tentang humanisme-universal, karena itu kita menerima humanisme universal dalam pengertian itu.”³¹

³⁰ D. S. Muljanto, “Ketika dan Setelah Lahirnya Manifes Kebudayaan,” *Berita Buana*, 11 Agustus, 1987, hlm. 49.

³¹ D.S. Moeljanto, “Lahirnya Manifes Kebudayaan,” *Horison*, 1967, hlm. 158.

Perdebatan dalam diskusi tersebut berlangsung cukup tajam. Pertemuan tersebut akhirnya memutuskan bahwa naskah Manifes Kebudayaan yang disusun Wiratmo Soekito dapat diterima sebagai bahan dasar yang perlu diperinci dan disederhanakan serta dipertegas perumusannya.³² Akhirnya, dalam sidang tersebut diputuskan akan dibentuk panitia perumus Manifes Kebudayaan. Panitia perumusan naskah Manifes Kebudayaan yang ditunjuk dalam sidang tersebut yaitu Zaini (ketua), Bokor Hutasuhut (sekretaris), Goenawan Mohamad, A. Bastari Asnin, Soe Hok Djin, dan Wiratmo Soekito.

Panitia perumusan naskah Manifes Kebudayaan mengadakan pertemuan kembali yang khusus merumuskan naskah Manifes Kebudayaan pada tanggal 23 Agustus 1963 di Jalan Raden Saleh 19. Hasil dari sidang tersebut memutuskan bahwa Manifes Kebudayaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Manifes Kebudayaan, penjelasan Manifes Kebudayaan, dan literatur Pancasila.

Tanggal 24 Agustus 1963 diadakan kembali sidang untuk mensahkan Manifes Kebudayaan. Sidang tersebut berlangsung mulai pukul 13.00 WIB di Jalan Raden Saleh 19 yang dipimpin kembali oleh Goenawan Mohamad. Dalam sidang tersebut mereka membicarakan hasil rumusan yang telah dilakukan oleh panitia perumusan naskah Manifes Kebudayaan. Secara aklamasi kemudian sidang menerima hasil kerja panitia perumus. Naskah Manifes Kebudayaan berbunyi seperti berikut

Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan, yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik Kebudayaan Nasional kami.

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa.

Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami.³³

³² Penjelasan mengenai rancangan naskah Manifes Kebudayaan akan dibahas di bab 3.

³³ Tulisan ini berjudul "Naskah Asli Manifes Kebudayaan" bertanggal 17 Agustus 1963. Tulisan ini dapat dilihat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin.

Naskah Manifes Kebudayaan tersebut ditandatangani oleh 22 seniman dan sastrawan Indonesia.³⁴ Para seniman dan sastrawan tersebut adalah H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohammad, A. Bastari Asnin, Bur Rasuanto, Soe Hok Djin, D.S. Moeljanto, Ras Siregar, Hartojo Andangdjaya, Syahwil, Djufri Tanissan, Binsar Sitompul, Taufiq A.G. Ismail, Gerson Poyk, M. Saribi, Poernawan Condronegoro, Ekana Siswoyo, Nashar, dan Boen S. Oemarjati.

Dalam sidang tersebut juga diambil ketentuan yang berbunyi (1) Manifes Kebudayaan tidak bisa diubah lagi dalam prinsipnya, (2) Manifes Kebudayaan tidak apriori melahirkan organisasi kebudayaan.³⁵ Akhirnya, lahirlah Manifes Kebudayaan. Lahirnya Manifes Kebudayaan ini diumumkan pertama kali dalam harian *Berita Republik* dalam ruang “Forum Sastra/Budaya Nomor 1 tahun 1 tanggal 19 Oktober 1963 dan dalam majalah *Sastra* nomor 9/10 tahun 3—1963. Setelah itu, pengumuman mengenai lahirnya Manifes Kebudayaan juga disiarkan di media-media massa lain, radio, dan organisasi-organisasi kebudayaan.

³⁴ Terdapat perbedaan mengenai jumlah seniman dan sastrawan penandatangan Manifes Kebudayaan. Goenawan Mohamad dalam *Kesusastraan dan Kekuasaan* mencatat, jumlah penanda tangan naskah Manifes Kebudayaan adalah 20 seniman (Ekana Siswoyo dan Nashar tidak termasuk ke dalam penanda tangan). Jakob Sumardjo dalam *Lintasan Sastra Indonesia Modern 1* mencatat ada 19 seniman dan sastrawan penanda tangan Manifes Kebudayaan (Ekana Siswoyo, Nashar, dan Gerson Poyk tidak termasuk ke dalam penanda tangan). Sementara itu, dalam naskah asli Manifes Kebudayaan, penulis mencatat ada 22 seniman dan sastrawan yang menandatangani naskah tersebut. Setelah penulis konfirmasi kepada Taufiq Ismail yang juga merupakan salah satu penanda tangan Manifes Kebudayaan, ia mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah masalah dalam pencetakan saja. Nashar, Ekana Siswoyo, dan Gerson Poyk juga pendukung Manifes Kebudayaan. Oleh karena itu, penulis memilih mencatat 22 seniman sesuai dengan naskah asli Manifes Kebudayaan.

³⁵ D. S. Muljanto, “Ketika dan Setelah Lahirnya Manifes Kebudayaan,” *Berita Buana*, 11 Agustus, 1987, hlm. 49.